

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN PUBLIK
TENTANG PENDIDIKAN INDONESIA - AMERIKA**

Oleh :

Maya Wulan Pramesti*)

Abstraksi

Sebagaimana dikemukakan oleh Feldman (1978); perbandingan kebijakan publik adalah suatu metode mempelajari kebijakan publik (meliputi proses kebijakan, hasil kebijakan dan dampak kebijakan) yang dilakukan dengan mengadopsi pendekatan "comparative". Yaitu membandingkan kebijakan tertentu dengan kebijakan yang lain yang ada di negara tertentu dengan yang ada di negara yang lain. Heidenheimer, et al., (1990), memberi penegasan yang lebih khusus, dengan menyatakan bahwa perbandingan kebijakan publik adalah studi tentang bagaimana, mengapa, dan dampak apa yang ditimbulkan dari adanya tindakan pemerintah dan tidak bertindakannya pemerintah.

Kata kunci: kebijakan publik, pendidikan, Indonesia-Amerika

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari perbandingan kebijakan publik paling sedikit ada 3 alasan dan tujuan yaitu:

1. Untuk memperoleh gambaran dan pelajaran bagaimana mendisain kebijakan yang baik.
2. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan lebih baik tentang bagaimana peran kelembagaan-kelembagaan pemerintah dan prosesproses politik.

3. Untuk mengkaji berbagai kebijakan yang ada secara lintas nasional.

Oleh karena itu untuk melakukan perbandingan kebijakan publik dimungkinkan ada banyak pilihan (choices), diantaranya adalah:

1. Pilihan-pilihan wilayah cakupan (*Choices of Scope*). Tipe *Choices of Scope* (pilihan wilayah cakupan) ini menganalisis sejauhmana peran dan tanggung jawab publik (pemerintah).
2. Pilihan-pilihan Distribusi (*Choices of Distribution*). Pilihan ini menganalisis dampak kebijakan itu ke mana saja.
3. Pilihan-pilihan Pemecahan Masalah Secara Detail dan Inovasi (*Choices of Restraints and Innovation*). Tipe pilihan ini menganalisis berbagai alternative yang mungkin dapat dipilih.

B. PEMBAHASAN

1. Deskripsi Kebijakan Pendidikan Amerika Serikat

a. Politik Pendidikan AS

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, terutama lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan atau diakreditasi oleh negara. Campur tangan dan intervensi negara pada pendidikan sekolah formal tampaknya sering diabaikan oleh para orang tua. Karena itu perlu adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa (masyarakat) setempat terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah-sekolah formal agar intervensi (kebijakan) negara dalam sector pendidikan bermakna positif bagi generasi berikutnya.

Selanjutnya tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Propinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Di Amerika Serikat terdapat 50 Negara Bagian dan 15.358 Distrik. Jadi sebanyak itu lembaga yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan.

b. Tujuan Pendidikan AS

Karakteristik utama politik sistem pendidikan Amerika Serikat adalah menonjolnya DESENTRALISASI. Yang memberi otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik). Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai system pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional. Tujuan system pendidikan Amerika secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai kesatuan dalam keragaman;
- 2) Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi;
- 3) Untuk membantu pengembangan individu;
- 4) Untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat; dan
- 5) Untuk mempercepat kemajuan nasional.

c. Manajemen Pendidikan AS

Manajemen pendidikan di Amerika Serikat dikelola berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Negara Bagian dan Pemerintah Daerah setempat. Di tingkat nasional (federal/pusat) dibentuk satu departemen, yaitu **DEPARTEMEN PENDIDIKAN FEDERAL**. Di tingkat Negara Bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama **BOARD of EDUCATION**. Badan ini bertugas dan berfungsi membuat

kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah (Negara Bagian).

d. Pendanaan Pendidikan AS

Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pemerintah Pusat (Federal), Anggaran Pemerintah Negara Bagian dan Anggaran Pemerintah Daerah.

e. Isu-isu Pendidikan AS

Menurut Agustiar Syah Nur (2001), ada beberapa isu dan masalah pendidikan yang dialami pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat, antara lain:

- a) Banyaknya anak usia sekolah yang tidak diasuh langsung oleh orang tua mereka.
- b) Tingginya tingkat perceraian, sehingga banyak anak-anak usia sekolah yang hanya diasuh oleh ibunya.
- c) Tingginya tingkat imigrasi yang umumnya berasal dari kalangan tidak mampu.
- d) Ternyata kualitas pendidikan dan lulusan sekolah di AS masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain dalam standar internasional.

f. Reformasi Pendidikan AS

Karena adanya berbagai permasalahan tersebut, pemerintah AS sejak tahun 1990 mencanangkan reformasi pendidikan. Pada tahun tersebut Presiden AS George H. B. Bush beserta seluruh Gubernur Negara Bagian (saat itu Bill Clinton termasuk menjadi salah satu Gubernur Negara Bagian) menyetujui reformasi pendidikan dengan mencanangkan 6 tujuan nasional pendidikan AS yang baru. Yaitu:

- a) Pada tahun 2000, seluruh anak di AS di waktu mulai masuk sekolah dasar sudah siap untuk belajar.
- b) Pada tahun 2000, tamatan sekolah menengah naik sekurangnya 90%.
- c) Pada tahun 2000, murid-murid di AS yang menyelesaikan pendidikannya pada "grade 4, 8 dan 12" mampu menunjukkan kemampuannya dalam mata pelajaran yang menantang, yaitu bahasa inggris, matematika, sains, sejarah, dan geografi.
- d) Pada tahun 2000, siswa-siswa AS adalah yang terbaik di dunia dalam bidang sains dan matematika.
- e) Pada tahun 2000, setiap orang dewasa AS dapat membaca dan menulis, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pada tahun 2000, setiap sekolah di AS harus bebas dari obat-obat terlarang dan kekerasan.

Pokok-pokok reformasi tersebut dimaksudkan sebagai pegangan dalam membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang sudah harus segera diimplementasikan dan hasilnya sudah harus kelihatan pada tahun 2000. Gerakan reformasi pendidikan yang juga dilakukan:

- a) Meningkatkan persyaratan untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan,
- b) Melaksanakan test standar untuk mengukur keberhasilan siswa,
- c) Menjalankan sistem penilaian yang ketat terhadap guru,

d) Memperbesar tambahan dana dari negara bagian bagi sekolah-sekolah.

Akhirnya AS benar-benar memperoleh kemajuan di bidang pendidikan.

2. Deskripsi Kebijakan Pendidikan Indonesia

a. Politik Pendidikan Indonesia

Politik pendidikan di Indonesia agaknya mengalami pergeseran dari sentralistik (terpusat) ke desentralisasi. Keadaan mencapai puncaknya saat kementerian pendidikan dipegang oleh Daoed Joesop. Saat itu tidak ada satupun kebebasan dalam sekolah dan kampus. Bahkan berbeda pendapat pun tidak dimungkinkan.

Dalam bukunya yang berjudul '*Membenahi Pendidikan Nasional*', Prof. H.A.R. Tilaar (2002), menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia bukan saja sekedar keinginan dan kemauan, tetapi sudah merupakan suatu keharusan. Ada 3 hal yang dapat menjelaskan urgensi desentralisasi pendidikan di Indonesia, yaitu :

- a) Untuk pembangunan masyarakat demokrasi;
- b) Untuk pembangunan *social capital*; dan
- c) Untuk peningkatan daya saing bangsa;

Pada awal abad XXI, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem

pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis.

Visi Pendidikan Nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeahlian, berdayasaing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Misi Pendidikan Nasional.

Misi pendidikan nasional, pemuda, dan olahraga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan berkualitas.
- 2) Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, dan kreatif.
- 3) Meningkatkan pengamalan ajaran agama untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdayasaing, berwawasan lingkungan.

b. Arah Kebijakan Pendidikan Indonesia

Kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia.

- 2) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional tenaga kependidikan.
- 3) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum.
- 4) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan;
- 5) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional.
- 6) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat maupun pemerintah.
- 7) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara terarah, terpadu dan menyeluruh.
- 8) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Program Pembangunan Pendidikan Indonesia

1) Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah

Program pembinaan pendidikan dasar dan prasekolah bertujuan untuk (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), SLTP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan lembaga pendidikan prasekolah sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh masyarakat; dan (2) meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung; (3) meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan prasekolah; dan (4) terselenggaranya manajemen pendidikan dasar dan prasekolah.

2) Program Pendidikan Menengah

Program pembinaan pendidikan menengah yang mencakup Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) ditujukan

untuk (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SMU, SMK, dan MA bagi seluruh masyarakat; dan (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, (3) meningkatkan kualitas pendidikan menengah; (4) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan, (5) meningkatkan keadilan dalam pembiayaan dengan dana publik, (6) meningkatkan efektivitas pendidikan, (7) meningkatkan kinerja personel dan lembaga pendidikan, (8) meningkatkan partisipasi masyarakat, dan (9) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

3) Program Pendidikan Tinggi

Program pembangunan nasional pendidikan tinggi bertujuan untuk (1) melakukan penataan sistem pendidikan tinggi; (2) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja; dan (3) meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.

4) Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

Program pembinaan pendidikan luar sekolah (PLS) ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal. Program sinkronisasi dan koordinasi bertujuan untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program-program pendidikan.

5) Program Penelitian dan Pengembangan

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan mutu hasil penelitian; (2) meningkatkan kualitas peneliti; (3) meningkatkan kompetensi lembaga-lembaga penelitian

dan pengembangan (litbang) publik; dan (4) membentuk iklim yang kondusif bagi sumber daya litbang.

d. Manajemen Pendidikan Di Indonesia

Administrasi dan manajemen (birokrasi) pendidikan di Indonesia tidak berbeda dengan administrasi dan manajemen sektor-sektor lain yang berbentuk departemen. Di tingkat pusat urusan pendidikan dikoordinasi oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL yang dipimpin oleh seorang menteri.

Ditingkat regional (propinsi), koordinasi urusan-urusan pendidikan ditangani oleh sebuah badan yang diberi nama DINAS PENDIDIKAN PROPINSI, yang dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi ditunjuk oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD Propinsi.

Sedangkan di tingkat daerah Kabupaten/Kota, koordinasi urusan pendidikan ditangani oleh sebuah lembaga yang diberi nama DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA.

e. Pendanaan Pendidikan di Indonesia

Jika dibandingkan dengan di AS, sumber pendanaan pendidikan di Indonesia berasal dari beberapa sumber anggaran. Yaitu berasal dari APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.

C. PENUTUP

Seperti yang ditegaskan oleh Heidenheimer (1990: 31) bahwa "di negara yang sistem politiknya tersentral (sentralistik), kebijakan sektor pendidikannya terpusat di dalam perundang-undangan nasional. Sebab di negara yang pemerintahannya sentralistik permasalahan

implementasi kebijakan itu relatif sedikit. Sedangkan di dalam sistem pemerintahan desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi keputusan banyak badan yang secara relevan berkaitan dengan sektor pendidikan.

Lebih dari itu, perubahan-perubahan reformasi kebijakan pendidikan harus selalu dirundingkan bersama dengan pemerintah daerah yang sudah diberi otonomi secara politik". Maka ketika sudah diketahui bahwa kebijakan pendidikan Indonesia ternyata didesain dan diterapkan secara desentralisasi (sama dengan AS), sampailah kita membuat analisis preskriptif yang dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi perbaikan dan reformasi (bilamana dimungkinkan) kebijakan pendidikan di Indonesia.

Analisis preskriptif penulis adalah sebagai berikut: Bahwa dalam banyak hal Indonesia sama dengan AS. Mungkin hal ini dikarenakan Indonesia lebih condong mereformasi kebijakan pendidikan berdasarkan hasil studi pengalaman di negara AS. Arah politik kebijakan dengan demikian adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya demokratisasi dari tingkat paling bawah ke tingkat yang lebih pusat, dari sektor yang paling sempit dampaknya ke sektor yang dampaknya sangat kompleks. Keterlibatan masyarakat luas dengan demikian sangat diperlukan.

*** Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sultan Fatah Demak**

Daftar Pustaka

- Alex Inkeles dan Larry J. Diamond, 1980, "Personal Development and National Development: A Cross-National Perspective," dalam *The Quality of Life: Comparative Studies*, ed. Alexander Szalai dan Frank M. Andrews, (London: Sage Publications).
- Chan, Sam M dan Sam, Tuti T, 2005, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Heidenheimer, at.al, 1990, *Comparative Public Policy : The Politics of Social Choice in America, Europe, and Japan*, ST. Martin's Press, New York.
- Huntington, Samuel P., 1997, *The Third Wave: Democratization In The Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press, 1991, (Diindonesiakan dalam *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Pustaka Utama Grafiti.
- Klingemann, Hans-Dieter, at.al, 2000, *Parties, Policies, and Democracy*, Diterjemahkan oleh: Sigit Jatmiko, *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*, Jentera bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nur, Agustiar Syah, 2001, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Penerbit LUBUK AGUNG, Bandung.
- Peters, B. Guy, 1998, *Public Policy Instruments: Evaluating the Tools of Public Administration*, Edward Elgar, USA.
- Ronald Inglehart, 1988 "The Renaissance of Political Culture," *American Political Science Review* 82.
- Tilaar, H.A.R, 2002, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, *tentang Pemerintahan Daerah*, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.